

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Konsep *Collaborative Governance* menggambarkan kolaborasi dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam suatu proses. Peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* untuk menganalisis proses kolaborasi pada 2 (dua) ekowisata yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedongsongo dengan DTW bercorak budaya dan Wisata Lereng Kelir dengan DTW bercorak alam. Peneliti memilih lokus tersebut karena berdasarkan jenis ekowisata yang terdiri dari wisata budaya dan alam yang mana wisata tersebut dapat dikategorisasikan menjadi sebuah ekowisata. Teori yang digunakan oleh peneliti disinergikan dengan konsep lainnya mengenai strategi dan pengelolaan ekowisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sendiri dalam proses pengelolaan wisata dan ekowisata berpedoman pada rencana strategis yang diimplementasikan selama 5 (lima) tahun. Pedoman tersebut juga memuat visi misi dan tujuan, upaya yang dilakukan selama lima tahun ke depan, dan evaluasi berdasarkan renstra sebelumnya. Renstra tersebut juga menjadi tolak ukur peneliti dalam melihat bagaimana upaya pengelolaan dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada dua ekowisata yang menjadi lokus penelitian ini.

Peneliti mendapati temuan pada Wisata Candi Gedongsongo dalam proses kolaborasi untuk pengelolaannya sudah sesuai dengan teori *Collaborative Governance*. *Stakeholder* yang terlibat proses kolaborasi dalam mengelola

ekowisata tersebut antara lain: Pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, dan Perum Perhutani); Swasta (Pengelola wisata yang berada baik di kawasan Candi Gedongsongo maupun yang memiliki jarak berdekatan dengan Candi Gedongsongo); dan Masyarakat (Paguyuban Jasa Kuda, Paguyuban Fotografer, dan Paguyuban UMKM). Proses pengelolaan dilakukan oleh sinergi antar *stakeholder* terkait dengan mengupayakan strategi pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan analisa penentu yang sudah diimplementasikan dengan baik, selain itu proses pengawasan dan evaluasi dilakukan secara periodik, serta selalu dilakukan pembuatan rencana strategis dalam pengelolaan hingga pengembangan ekowisata Candi Gedongsongo.

Peneliti yang juga melakukan penelitian pada Wisata Lereng Kelir mendapati temuan yang cukup jauh berbeda dengan yang ada pada Wisata Candi Gedongsongo, yakni belum optimalnya proses kolaborasi dan pengelolaan diimplementasikan. Peneliti mendapatkan temuan data primer dan sekunder yang dapat dikatakan kurang sinkron. Hal tersebut dibuktikan pada proses kolaborasi untuk pengelolaannya masih belum mengoptimalkan dari teori *Collaborative Governance* yang mana hanya masyarakat yang berperan besar dalam mengelola ekowisata tersebut dan andil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang maupun swasta tidak sebesar andil masyarakat. Masyarakat yang saling bersinergi mengelola Wisata Lereng Kelir, yakni Karang Taruna Desa Brongkol dan masyarakat sekitar. Pengelola Lereng Kelir mengatakan jika Pemerintah pada hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang hanya memberikan pelatihan dan

pengawasan di awal penemuan ekowisata dan berhenti pada masa pergantian kepemimpinan.

Peneliti berhasil mendapatkan temuan implementasi *collaborative governance* dan strategi dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Semarang serta ekowisata yang menjadi dua fokus penelitian. Dua tempat yang berbeda dan hasil yang berbeda pula, namun memiliki kesamaan dalam proses pengelolaan dan pengembangan, yakni masih mengupayakan peningkatan kualitas ekowisata yang ada di dalamnya.

#### **4.2. Saran**

Peneliti dalam melihat kolaborasi dan pengelolaan yang dilakukan para *stakeholder* pada ekowisata Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir dengan teori *Collaborative Governance* dan strategi pengembangan wisata. Peneliti bertujuan melihat implementasi pada lokus penelitian sudahkan konsep yang digunakan peneliti diterapkan pada dua ekowisata tersebut. Hal menarik yang ditemui peneliti dalam proses penelitian bahwa terdapat data primer yang kenyataannya berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang kurang menjalankan perannya sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata dengan tidak banyak berkontribusi pada wisata yang ada di seluruh Kabupaten Semarang dan hanya berfokus pada pengelolaan wisata yang memiliki potensial tinggi.

Saran yang peneliti berikan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, antara lain: lebih berkontribusi pada pelatihan, pengawasan, dan evaluasi pada setiap objek wisata di Kabupaten Semarang; bertanggung jawab pada jumlah

kunjungan tiap objek wisata di Kabupaten Semarang; serta menerapkan strategi pengelolaan dan pengembangan wisata pada seluruh objek tidak hanya pada 5 (lima) objek wisata potensial yang dikelola dengan mulai dari pengembangan destinasi, pengelolaan pemasaran, pengembangan kemitraan, dan intervensi dalam memberikan anggaran dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata. Peneliti menganggap saran tersebut dapat tercapai jika dilakukan pembenahan dan komitmen tiap *stakeholder* untuk saling berkolaborasi meningkatkan wisata yang ada di Kabupaten Semarang.